

Pemerataan sebagai Arahan Rencana dan Strategi Pembangunan Wilayah di Kabupaten Cianjur

Equity as Direction of Regional Development Plans and Strategies in Cianjur Regency

Ganjar Priadi¹, Atang Sutandi² and Muhammad Firdaus³

Received: --/--/----

Accepted: --/--/----

Abstrak: Perencanaan pembangunan dengan pendekatan pemerataan menjadi prinsip penuntun pembangunan masa depan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan. Kabupaten Cianjur sebagai wilayah terluas kedua di Provinsi Jawa Barat memiliki fokus kebijakan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Tujuan dari penelitian ini adalah (a) menganalisis tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur; (b) menganalisis pemerataan pembangunan di Kabupaten Cianjur; (c) menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Cianjur; dan (d) merumuskan arahan rencana dan strategi pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan adalah analisis skalogram, indkes theil, regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur selama kurun waktu 2003-2014 mengalami peningkatan nilai IPK, namun secara hierarki sebagian besar masih berhierarki rendah. Dalam periode waktu yang sama, kondisi pemerataan mengalami penurunan seiring meningkatnya ketimpangan wilayah. Persentase rumah tangga pengguna listrik merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan. Arahan dan strategi pembangunan wilayah kedepannya harus memprioritaskan kecamatan yang belum berkembang untuk menciptakan pemerataan.

Kata kunci: Pamarataan, Pembangunan Wilayah, dan Skalogram

Abstract: Development plans with an equalization approach becomes the guiding principle of future development to ensure justice and sustainability. Cianjur regency as the second largest area in West Java Province has a focus of development policy on economic growth and equity. This study was aimed to (a) analyze the level of regional development in Cianjur Regency; (b) analyze equalization of development in Cianjur Regency; (c) determine factors affecting development in Cianjur Regency; and (d) formulate direction of regional development plans and strategies in Cianjur regency. The method used are scalogram, theil index, and panel data regression. The results of this study indicated regional development in Cianjur Regency during periods of 2003-2014 has increased value of IPK, but in hierarchy mostly still low hierarki. In the same period of time, condition of equity decreased in accordance with increased regional inequality. Percentage of households of electric users is a very influential factor on development. Future directions and development strategies must consider underdeveloped region to create equity.

Keywords: Eequity, Regional development, and scalogram

¹ Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, IPB

² Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB

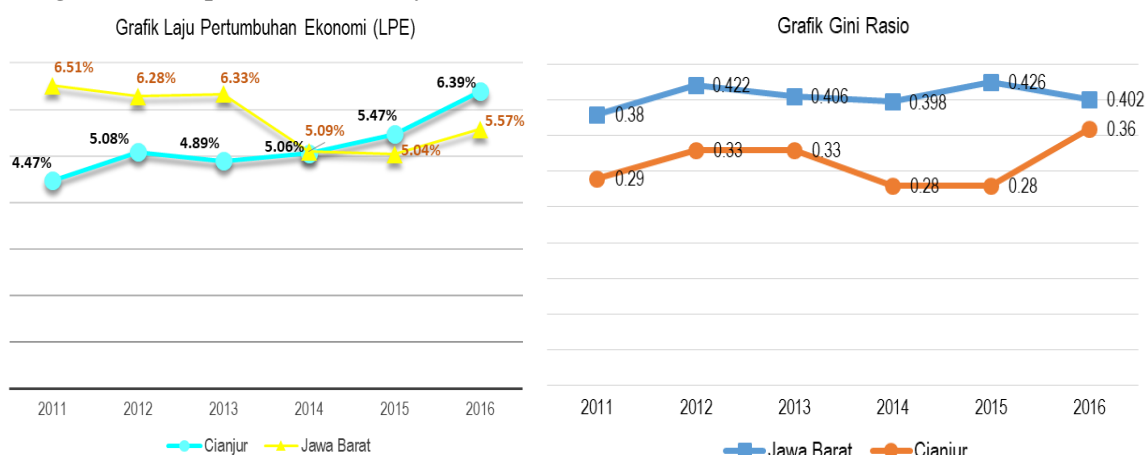
³ Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB

PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya masalah ketimpangan, perencanaan pembangunan dengan pendekatan pemerataan mendapat perhatian negara-negara di dunia dan dijadikan sebagai salah satu tujuan agenda pembangunan global *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Konsekuensinya pemerataan harus dijadikan sebagai prinsip penuntun bagi pembangunan masa depan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan (Herath 2017). Pemerataan pembangunan tidak menyiratkan pembangunan yang sama disemua daerah, melainkan pemanfaatan potensi masing-masing daerah sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi penduduk disemua wilayah (Arsovska 2017). Dalam agenda pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dimensi pemerataan dan kewilayahan menjadi salah satu strategi pembangunan.

Menurut laporan *World Economic Forum* (2018), nilai *Inclusive Development Index (IDI)* Indonesia sebesar 3.95 dan berada di peringkat ke-36 dari 74 negara berkembang dalam pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jauh di bawah Malaysia di peringkat ke-13 (*IDI* 4.39), Thailand di peringkat ke-17 (*IDI* 4.24), dan Vietnam di peringkat ke-33 (*IDI* 3.98). Permasalahan ketimpangan berpengaruh negatif terhadap nilai *IDI* Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan gini rasio ketimpangan antargolongan pendapatan penduduk di Indonesia pada bulan September 2017 masih cukup tinggi yakni sebesar 0.391. Selain itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan masalah yang masih harus dihadapi baik dalam tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun antar kepulauan (Firdaus 2013).

Kabupaten Cianjur sebagai wilayah terluas ke-2 di Provinsi Jawa Barat memiliki fokus kebijakan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Pada periode tahun 2011-2016, meskipun masih mengalami fluktuasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan tren positif. Bahkan tahun 2015 dan 2016 LPE Kabupaten Cianjur mampu tumbuh di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat. Dilihat dari perbandingan antara LPE dan gini rasio ketimpangan pendapatan antargolongan penduduk di Kabupaten Cianjur (Gambar 1), dalam periode tahun yang sama terdapat kontradiksi antara tren positif LPE dengan upaya pemerataan pembangunan. Bahkan pada tahun 2016 gini rasio mengalami kenaikan sebesar 0.08, yang merupakan kenaikan paling tinggi dibandingkan dengan 26 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat.



Sumber: BPS (2018), data diolah.

Gambar 1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Gini Rasio Kabupaten Cianjur tahun 2011-2016

Semakin melebarnya ketimpangan antargolongan pendapatan penduduk diduga terjadi pula pada ketimpangan antarwilayah. Momentum baik dalam pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat diarahkan untuk mewujudkan pemerataan. Kebijakan fokus

pembangunan yang telah dibuat Pemerintah Daerah untuk menciptakan pemerataan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 diharapkan dapat memperkecil bahkan menghilangkan ketimpangan yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan:

1. Menganalisis tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur.
2. Menganalisis pemerataan pembangunan di Kabupaten Cianjur.
3. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Cianjur.
4. Merumuskan arahan rencana dan strategi pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli hingga bulan Desember 2017 di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Letak geografis Kabupaten Cianjur berada pada koordinat $106^{\circ}42'-107^{\circ}25'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}2'-7^{\circ}25'$ Lintang Selatan. Wilayah penelitian meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur yakni sebanyak 32 kecamatan.

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder antara lain data Potensi Desa (Podes) tahun 2003, 2006, 2008, 2011, dan 2014, data jumlah penduduk, data kepadatan penduduk, dan data persentase keluarga pengguna listrik bersumber dari BPS, data jumlah keluarga miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), data produktivitas padi dari Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, serta Peta Administrasi Kabupaten Cianjur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cianjur.

Analisis Data

1. Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah

Perkembangan wilayah dapat dipahami dari semakin meningkatnya jumlah komponen wilayah serta penyebarannya (jangkauan spasial). Hal ini bermakna suatu wilayah dikatakan berkembang jika jumlah komponen/aktifitas wilayah tersebut bertambah atau aktifitas dari wilayah tersebar lebih luas (Panuju dan Rustiadi 2013). Metode skalogram digunakan untuk menganalisis perkembangan wilayah berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana (Wonua 2014). Jenis data yang digunakan yang digunakan antara lain jumlah penduduk, jarak menuju fasilitas umum, jumlah dan jenis fasilitas umum (fasilitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial). Hasil yang terkait dengan nilai indikator dalam teknik skalogram digolongkan dalam tiga kelompok yaitu: (a) wilayah hierarki I (tingkat perkembangan tinggi) yaitu wilayah dengan jumlah indeks baku sama dengan nilai rata-rata ditambah standar deviasi ($IPK > (Average + Stdev)$); wilayah hierarki II (tingkat perkembangan sedang) yaitu wilayah dengan jumlah indeks baku lebih besar sama dengan nilai rata-rata ($IPK \geq Average$); dan hierarki III (tingkat perkembangan rendah) yaitu wilayah dengan jumlah indeks baku kurang dari nilai rata-rata ($IPK < Average$).

2. Analisis Pemerataan Pembangunan

Analisis pemerataan pembangunan ditunjukkan dengan ada atau tidaknya ketimpangan wilayah. Semakin kecil nilai ketimpangan menunjukkan semakin meratanya pembangunan. Metode Indeks Theil dipilih untuk mengukur ketimpangan karena mempunyai kelebihan dalam mendekomposisi ketimpangan dalam wilayah dan

ketimpangan antar wilayah (Sinha *and* Rastogi 2015; Yu *et al.* 2015). Selain itu, Indeks Theil juga bisa disesuaikan dengan baik untuk penelitian lain tidak hanya untuk menghitung ketimpangan pendapatan (Lu *et al.* 2017). Data yang digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan pembangunan adalah Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) hasil analisis skalogram dan jumlah penduduk tahun 2003, 2006, 2008, 2011, dan 2014. Rumus Indeks Theil dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$ITheil = \sum (y_j/Y) \cdot \log[(y_j/Y)/(x_j/X)]$$

Dimana:

- $ITheil$ = Jumlah keseluruhan ketimpangan di Kabupaten Cianjur (Indeks Theil)
 y_j = IPK di kecamatan ke- j
 Y = IPK di Kabupaten Cianjur
 x_j = Jumlah penduduk di kecamatan ke- j
 X = Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur

3. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan

Perkembangan pola dan struktur wilayah secara umum sangat dipengaruhi oleh faktor fisik internal terdiri dari keadaan geografis, topografi, fungsi kota, sejarah dan kebudayaan, dan unsur-unsur umum lainnya seperti jaringan jalan, penyediaan air bersih dan jaringan penerangan listrik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat (Febrianty *et al.* 2015). Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Cianjur menggunakan metode regresi data panel statis. Pendekatan data panel merupakan gabungan antara pendekatan *cross section* dan *time series* (Firdaus 2011). Metode data panel memiliki dua pendekatan, yaitu *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Keduanya dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya korelasi antara komponen *error* dengan peubah bebas. Pengujian terhadap asumsi ada tidaknya korelasi antara regresor dan efek individu digunakan untuk memilih apakah *fixed* atau *random effects* yang lebih baik menggunakan *Hausman Test* (Prasetyo dan Firdaus 2009).

Rustiadi *et al.* (2011) menyebutkan tingginya kapasitas dan hierarki wilayah tercermin dari besaran aktivitas sosial ekonomi (jumlah penduduk, perputaran uang, PDRB, jumlah jenis organisasi atau lembaga formal dan non formal) serta besaran jumlah dan jumlah jenis sarana pelayanan. Namun secara fisik dan operasional yang paling mudah dinilai dalam menghitung kapasitas wilayah adalah sumberdaya buatan (sarana dan prasarana wilayah). Sehingga variabel *dependent* yang digunakan adalah Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) karena dapat mencerminkan kapasitas wilayah. Variabel *independent* yang digunakan yaitu produktivitas padi, kepadatan penduduk (Giannias *et al.* 2000), jumlah keluarga miskin, dan persentase rumah keluarga pengguna listrik. Data yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur ($i=32$), dengan 5 titik waktu analisis ($t=5$) yakni tahun 2003, 2006, 2008, 2011, dan 2014. Semua variabel dalam nilai logaritma natural. Model penelitian dinyatakan dengan:

$$IPK_{it} = \alpha + \beta_1 AGRI_{it} + \beta_2 ELECTRIC_{it} + \beta_3 POP_{it} + \beta_4 POOR_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- IPK : Indeks Perkembangan Kecamatan
 AGRI : Produktivitas padi
 ELECTRIC : Persentase rumah tangga pengguna listrik
 POP : Kepadatan penduduk
 POOR : Jumlah keluarga miskin

4. Analisis Arahana Rencana dan Strategi Pembangunan Wilayah

Penyusunan arahan rencana dan strategi pembangunan wilayah dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil kajian analisis perkembangan wilayah, kondisi pemerataan pembangunan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Cianjur.

Selanjutnya, dilakukan integrasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 sehingga menghasilkan arahan dan rencana dan strategi terhadap kebijakan pembangunan wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis tingkat perkembangan wilayah

Tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur tahun 2003, 2006, 2008, 2011, dan 2014 ditunjukan oleh nilai IPK dan hierarki wilayah masing-masing kecamatan hasil analisis skalogram yang secara ringkas disajikan dalam Tabel 1 dan Gambar 2. Dalam rentang waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2014, nilai IPK masing-masing kecamatan mengalami fluktuasi namun secara keseluruhan memiliki tren positif. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya nilai rata-rata, nilai terendah dan nilai tertinggi dari kondisi awal analisis tahun 2003 hingga kondisi akhir analisis tahun 2014. Nilai rata-rata IPK sebesar 41.8 di tahun 2003 naik 10% menjadi 45.9 di tahun 2014. Bahkan pada tahun 2011 nilai rata-rata IPK mencapai 49.5 atau naik 19% dari nilai tahun 2003. Keadaan serupa terjadi pada nilai terendah dan nilai tertinggi, meskipun berfluktuasi nilai akhir tahun analisis masih lebih besar dibandingkan dengan nilai awal tahun analisis. Nilai terendah naik sebesar 40% dari 21.7 di tahun 2003 menjadi 30.4 di tahun 2014. Sementara nilai tertinggi naik sebesar 50% dari 77.7 di tahun 2003 menjadi 116.6 di tahun 2014. Kondisi tersebut menggambarkan perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur memiliki tren positif melalui pembangunan sarana dan prasarana wilayah diseluruh kecamatan. Sesuai dengan penelitian Rahman (2009) yang menyebutkan kenaikan IPK disebabkan oleh penambahan jumlah dan jenis fasilitas pada suatu wilayah sehingga indeks perkembangannya menjadi meningkat, dan pada tingkat yang tinggi dapat disertai dengan peningkatan hierarki.

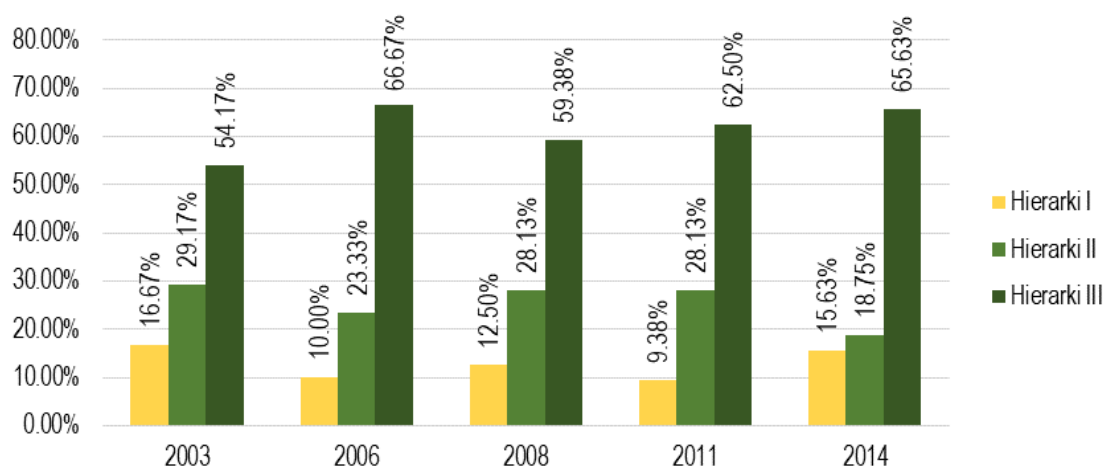
Tabel 1. Ringkasan Nilai IPK dan Hierarki Wilayah Tahun 2003, 2006, 2008, 2011, dan 2014

Kecamatan	IPK dan Hierarki Wilayah									
	2003		2006		2008		2011		2014	
WP Utara										
Cianjur	75.6	I	96.2	I	106.0	I	120.0	I	116.6	I
Ciranjang	63.0	I	74.6	I	69.9	I	72.9	I	68.1	I
Pacet	77.7	I	59.1	II	65.9	I	52.3	II	66.5	I
Cipanas	*)	*)	107.6	I	79.9	I	68.4	I	60.6	II
Karangtengah	54.8	II	43.9	II	44.9	II	54.2	II	54.7	II
Cilaku	63.8	I	56.7	II	43.7	II	56.2	II	47.6	III
Cibeber	50.5	II	41.6	III	33.5	III	41.9	III	46.7	III
Mande	50.8	II	38.0	III	37.2	III	44.5	III	43.2	III
Bojongpicung	50.5	II	32.1	III	41.2	II	42.1	III	37.0	III
Haurwangi	*)	*)	*)	*)	39.2	III	46.5	III	40.7	III
Cugenang	43.1	II	35.9	III	39.5	III	44.7	III	40.3	III
Sukaluyu	40.8	III	54.3	II	40.5	III	51.9	II	39.5	III
Cikalongkulon	43.3	II	38.3	III	44.1	II	46.6	III	37.3	III
Sukaresmi	30.8	III	31.5	III	39.5	III	58.4	II	34.9	III
Warungkondang	40.9	III	36.6	III	51.5	II	49.9	II	44.0	III
Gekbrong	*)	*)	26.0	III	27.1	III	42.9	III	32.7	III

WP Tengah										
Campaka	38.2	III	26.8	III	33.6	III	42.55	III	35.8	III
Campakamulya	~*)	~*)	43.0	II	48.18	II	65.01	II	73.1	I
Tanggeung	34.4	III	30.7	III	38.94	III	58.92	II	56.3	II
Kadupandak	27.3	III	22.9	III	33.36	III	40.02	III	52.0	II
Cijati	~*)	~*)	36.5	III	54.01	II	55.13	II	68.1	I
Takokak	21.7	III	40.4	III	34.55	III	42.71	III	39.5	III
Sukanagara	47.2	II	44.7	II	44.73	II	38.66	III	38.9	III
Pagelaran	31.6	III	34.5	III	47.3	II	44.89	III	38.3	III
Pasirkuda	~*)	~*)	~*)	~*)	33.7	III	44.6	III	54.8	II
WP Selatan										
Cibinong	33.3	III	22.1	III	20.46	III	27.77	III	41.0	III
Sindangbarang	29.2	III	31.0	III	32.35	III	35.03	III	39.9	III
Naringgul	36.2	III	30.7	III	26.84	III	42.04	III	35.8	III
Cikadu	~*)	~*)	19.7	III	32.59	III	29.54	III	34.3	III
Cidaun	26.8	III	50.1	II	35.07	III	34.48	III	33.7	III
Agrabinta	28.8	III	21.6	III	25.14	III	27.08	III	30.4	III
Leles	~*)	~*)	39.1	III	41.22	III	62.56	III	55.1	II
Nilai Terendah	21.7		19.7		20.5		27.1		30.4	
Nilai Tertinggi	77.7		107.5		106.0		120.0		116.6	
Rataan	41.8		42.1		43.3		49.5		45.9	
Standar Deviasi	13.6		20.3		17.0		17.0		11.9	

Sumber: Hasil olah data skalogram.

Keterangan: *) Tahun 2003 dan 2006 terdapat beberapa kecamatan yang belum mengalami pemekaran dari kecamatan induknya yakni Cipanas (Pacet), Gekbrong (Warungkondang), Campakamulya (Campaka), Cijati (Kadupandak), Leles (Agrabinta), Cikadu (Cibinong), Haurwangi (Bojongpicung), dan Pasirkuda (Pagelaran).

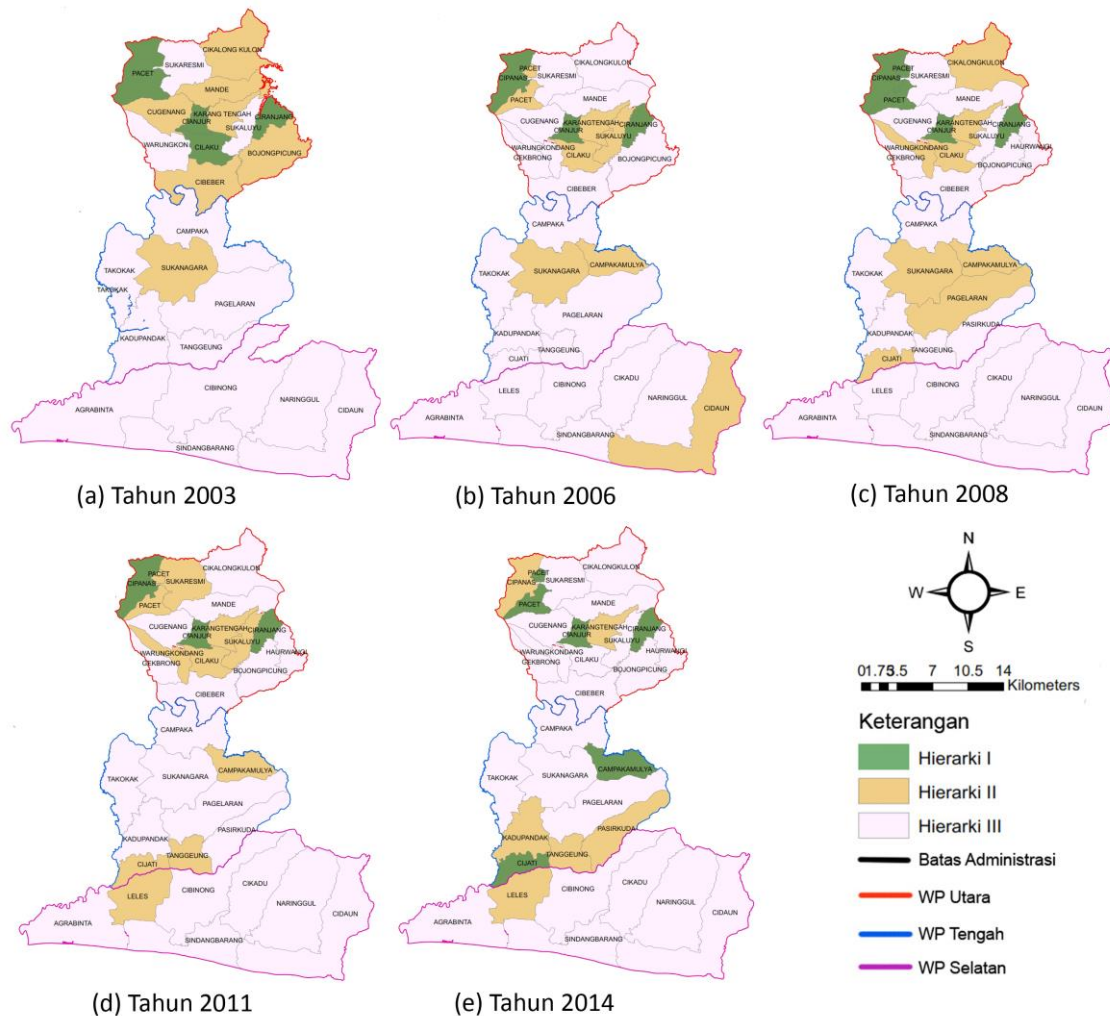


Sumber: Hasil olah data.

Gambar 2. Persentase Hierarki Wilayah Tahun 2003, 2006, 2008, 2011, dan 2014

Berdasarkan persentase hierarki wilayah dalam kurun waktu 2003 hingga 2014, Kabupaten Cianjur dapat digolongkan kedalam wilayah dengan tingkat perkembangan rendah. Hal ini disebabkan pada setiap titik tahun analisis sebagian besar kecamatan-kecamatan memiliki hierarki III (tingkat perkembangan rendah) dengan rata-rata 61.67%. Jumlah kecamatan yang berhierarki I (tingkat perkembangan tinggi) rata-rata hanya 12.83%, dan 25.50% lainnya adalah kecamatan-kecamatan dengan hierarki II (tingkat perkembangan sedang). Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator ketidakmampuan Kabupaten Cianjur dalam memajukan wilayah sehingga termasuk kategori daerah “tertinggal” apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat.

Dilihat dari perbandingan sebaran spasial hierarki wilayah (Gambar 3), dalam kurun waktu 2003 hingga 2014 kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat perkembangan tinggi (hierarki I) sebagian besarnya berada di WP Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan masih terkonsentrasi hanya di beberapa kecamatan terutama di WP Utara. Sesuai penelitian Firmansyah *et al.* (2014) yang menyebutkan bahwa berdasarkan indikator penyebaran fasilitas sosial, sebagian besar kecamatan-kecamatan tergolong wilayah maju berada di wilayah utara, sedangkan kecamatan-kecamatan di wilayah tengah dan selatan sebagian besar tergolong wilayah berkembang dan tertinggal.

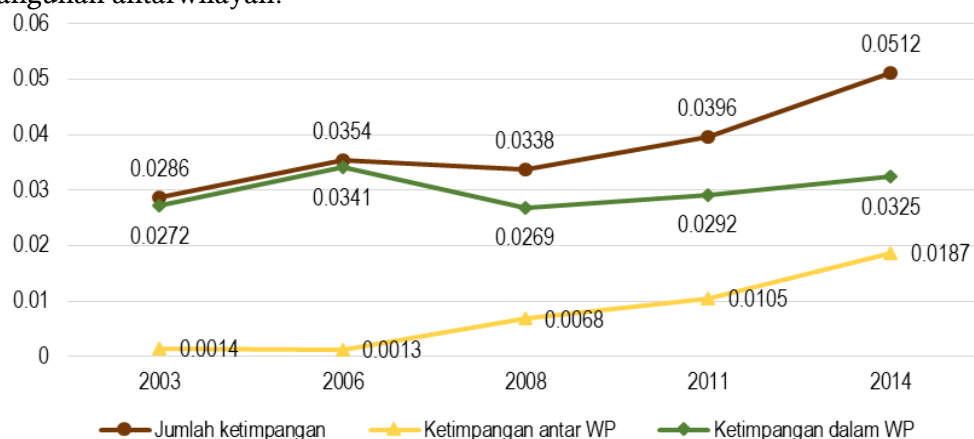


Sumber: Hasil olah data.

Gambar 3. Perbandingan Sebaran Spasial Hierarki Wilayah Tahun 2003-2014

Hasil analisis pemerataan pembangunan

Analisis pemerataan pembangunan dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya ketimpangan wilayah. Semakin kecil nilai ketimpangan menunjukkan semakin meratanya pembangunan. Hasil analisis Indeks Theil dalam Gambar 4 dengan dekomposisi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemerataan pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur kurun waktu 2003-2014 mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Hal tersebut tergambar dari meningkatnya nilai ketimpangan yang diukur dengan Indeks Theil antara kondisi awal tahun analisis sebesar 0.0286 menjadi 0.0512 diakhir tahun analisis. Keadaan ini terjadi karena proporsi pembangunan yang tidak sama dan hanya terkonsentrasi di beberapa kecamatan. Sesuai penelitian Aprianoor dan Muktiali (2015) yang mengkategorikan Kabupaten Cianjur ke dalam tipe *low-3* dalam tipologi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat. Penyebabnya adalah kurang memiliki sarana dan prasarana wilayah yang memadai serta kondisi infrastruktur seperti jalan yang masih buruk. Meningkatnya nilai ketimpangan pembangunan antarwilayah membuktikan kebenaran hipotesis awal penelitian bahwa semakin melebarnya gini rasio ketimpangan antargolongan pendapatan penduduk terjadi pula pada semakin melebarnya ketimpangan pembangunan antarwilayah.



Gambar 4. Tren ketimpangan wilayah berdasarkan Indeks Theil

Tabel 2. Dekomposisi Indeks Theil Tahun 2003, 2006, 2008, 2011 dan 2014

Tahun	Dekomposisi Ketimpangan	Indeks Theil			Total
		WP Utara	WP Tengah	WP Selatan	
2003	Antar WP	0.0171	-0.0080	-0.0070	0.0014
	Dalam WP	0.0214	0.0032	0.0025	0.0272*
	Jumlah	0.0386*	-0.0048	-0.0052	0.0286
2006	Antar WP	-0.0152	0.0126	0.0039	0.0013
	Dalam WP	0.0182	0.0125	0.0035	0.0341*
	Jumlah	0.0030	0.0251*	0.0073	0.0354
2008	Antar WP	-0.0288	0.0361	-0.0005	0.0068
	Dalam WP	0.0126	0.0096	0.0047	0.0269*
	Jumlah	-0.0162	0.0457*	0.0042	0.0338
2011	Antar WP	-0.0391	0.0426	0.0069	0.0105
	Dalam WP	0.0091	0.0124	0.0077	0.0292*
	Jumlah	-0.0300	0.0550*	0.0146	0.0396
2014	Antar WP	-0.0523	0.0577	0.0134	0.0187
	Dalam WP	0.0078	0.0198	0.0049	0.0325*
	Jumlah	-0.0445	0.0775*	0.0183	0.0512

Sumber: Hasil olah data Indeks Theil.

Keterangan: *) Nilai tertinggi sumber utama ketimpangan

Hasil dekomposisi Indeks Theil menunjukkan bahwa sumber utama ketimpangan di Kabupaten Cianjur pada setiap titik tahun analisis adalah ketimpangan antar kecamatan dalam WP. Pada tahun 2003 ketimpangan dalam WP menyumbang 95.16% terhadap jumlah keseluruhan ketimpangan. Nilai ketimpangan terbesar di WP Utara sebesar 0.0386 yang berarti ketimpangan antar di WP Utara sangat lebar. Sementara WP Tengah dan WP Selatan memiliki nilai ketimpangan minus dengan arti meratanya pembangunan di wilayah tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa di WP Tengah dan WP Selatan kondisi pemerataan pembangunan berada pada merata rendah.

Pada tahun 2006 ketimpangan dalam WP menyumbang 96.22% terhadap jumlah keseluruhan ketimpangan. Nilai ketimpangan terbesar berada di WP Tengah yakni 0.0251 yang berarti jarak ketimpangan pembangunan antar kecamatan di WP Tengah sangat lebar. WP Utara memiliki nilai ketimpangan paling kecil yakni 0.0030 yang berarti pembangunan antar kecamatan di WP Utara semakin merata. Sementara WP Selatan juga memiliki nilai ketimpangan kecil sebesar 0.0073, namun dalam kondisi merata rendah.

Pada tahun 2008 ketimpangan dalam WP menyumbang 71.89% terhadap jumlah keseluruhan ketimpangan. Nilai tertinggi berada di WP Tengah sebesar 0.0457 dengan arti jarak ketimpangan antar kecamatan di WP Tengah semakin melebar. WP Utara memiliki nilai ketimpangan paling kecil yakni -0.0162 yang berarti pembangunan antar kecamatan di WP Utara semakin merata. Sementara WP Selatan juga memiliki nilai ketimpangan kecil sebesar 0.0042, namun dalam kondisi merata rendah.

Pada tahun 2011 ketimpangan dalam WP menyumbang 73.62% terhadap jumlah keseluruhan ketimpangan. Nilai ketimpangan tertinggi di WP Tengah sebesar 0.0550 dengan arti jarak ketimpangan antar kecamatan di WP Tengah semakin melebar. WP Utara memiliki nilai ketimpangan paling kecil yakni -0.0300 yang berarti pembangunan antar kecamatan di WP Utara semakin merata. Sementara WP Selatan memiliki nilai ketimpangan kecil sebesar 0.0146, namun dalam kondisi merata rendah.

Pada tahun 2014 ketimpangan dalam WP menyumbang 63.45% terhadap jumlah keseluruhan ketimpangan. Nilai ketimpangan tertinggi berada di WP Tengah sebesar 0.0775 dengan arti jarak ketimpangan antar kecamatan di WP Tengah semakin melebar. WP Utara memiliki nilai ketimpangan paling kecil yakni -0.0445 yang berarti pembangunan antar kecamatan di WP Utara semakin merata. Sementara WP Selatan memiliki nilai ketimpangan kecil sebesar 0.0183, namun dalam kondisi merata rendah.

Hasil faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan

Perkembangan pola dan struktur wilayah secara umum sangat dipengaruhi oleh faktor fisik internal terdiri dari keadaan geografis, topografi, fungsi kota, sejarah dan kebudayaan, dan unsur-unsur umum lainnya seperti jaringan jalan, penyediaan air bersih dan jaringan penerangan listrik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat (Febrianty *et al.* 2015). Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan menggunakan variabel *dependent* Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) serta variabel *independent* produktivitas padi, kepadatan penduduk, jumlah keluarga miskin, dan persentase rumah keluarga pengguna listrik.

Berdasarkan hasil uji Hausman dengan *p-value* sebesar 0.8624 maka model data panel statis yang terpilih adalah model *random effect*. Setelah dilakukan uji Hausman dan diperoleh model yang paling sesuai, maka dilakukan estimasi dari persamaan. Hasil estimasi persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Cianjur sebagaimana disajikan pada Tabel 3 menunjukkan nilai *R-square* sebesar 0.6105, artinya model mampu menjelaskan variasi pembangunan sebesar 61.05%. Sedangkan 38.95% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model.

Tabel 3. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan di Kabupaten Cianjur Tahun 2003, 2006, 2008, 2011, dan 2014

Variabel bebas	Koefisien	Std. Error	Probabilitas
AGRI	0.0579	0.2246	0.7970
ELECTRIC	0.9498	0.2258	0.0000*
POP	0.2905	0.1027	0.0050*
POOR	-0.3745	0.1470	0.0110*
Cons	0.3578	1.5286	0.8150
R-squared	0.6105		

Sumber: Hasil olah data regresi data panel statis.

Keterangan: *) signifikan pada $\alpha < 5\%$

Hasil estimasi pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel *independent* persentase rumah tangga pengguna listrik dan kepadatan penduduk berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien positif, sementara variabel jumlah keluarga miskin berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien negatif. Variabel yang memiliki koefisien bernilai positif memiliki arti setiap peningkatan variabel berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan. Sementara variabel yang memiliki koefisien negatif memiliki arti setiap peningkatan variabel berpengaruh terhadap penurunan pembangunan. Sedangkan variabel produktivitas padi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena data yang digunakan tidak sesuai dengan konteks persamaan ini.

Secara berurutan variabel yang memiliki nilai elastisitas terbesar atau yang paling berpengaruh besar terhadap pembangunan di Kabupaten Cianjur adalah persentase rumah tangga pengguna listrik sebesar 0.9498, kepadatan penduduk sebesar 0.2905, dan terakhir jumlah keluarga miskin yang mempunyai koefisien negatif sebesar -0.3745. Interpretasi pada masing-masing variabel bebas yang signifikan adalah: (a) variabel persentase rumah tangga pengguna listrik dengan tingkat elastisitas 0.9498, artinya setiap kenaikan 1% jumlah persentase rumah tangga pengguna listrik akan meningkatkan pembangunan sebesar 0.9498% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (*ceteris paribus*); (b) variabel kepadatan penduduk dengan tingkat elastisitas 0.2905, artinya setiap kenaikan 1% kepadatan penduduk akan meningkatkan pembangunan sebesar 0.2905%, *ceteris paribus*; dan (c) variabel jumlah keluarga miskin dengan tingkat elastisitas -0.3745, artinya setiap kenaikan 1% jumlah keluarga miskin akan menurunkan pembangunan sebesar 0.3745%, *ceteris paribus*.

Bila dibandingkan antar ketiga variabel signifikan, yang paling besar pengaruhnya adalah persentase rumah tangga pengguna listrik sebesar 0.9498. Angka elastisitas ini tergolong sangat besar. Nilai yang signifikan dengan tingkat elastisitas tinggi terjadi karena ketersediaan energi listrik bagi masyarakat merupakan hal penting untuk meningkatkan produktivitas dalam menggerakkan roda perekonomian agar mampu mendukung percepatan pembangunan. Sesuai dengan penelitian Prasetyo dan Firdaus (2009) yang menyatakan energi listrik sangat penting dalam kegiatan produksi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan. Variabel ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan karena sampai akhir tahun 2015, Rasio Elektrifikasi (RE) di Kabupaten Cianjur baru mencapai 82.74% atau masih terdapat 107,584 rumah tangga yang belum menggunakan listrik.

Kepadatan penduduk dengan tingkat elastisitas 0.2905 mempunyai pengaruh positif bagi pembangunan. Banyak pandangan yang menyatakan kondisi kependudukan akan mempengaruhi pembangunan yang dilaksanakan baik berpengaruh positif maupun negatif. Salah satu pandangan positif dikemukakan Klasen and Nestmann (2006) yang menyatakan kepadatan penduduk pada suatu wilayah akan menghasilkan interaksi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi seperti tingkat pengeluaran publik. Selain itu, Meyer (2016) menyatakan kepadatan penduduk yang lebih tinggi biasanya berhubungan dengan tingkat

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ditinjau dari hubungan kepadatan penduduk dengan tingkat perekonomian daerah di Kabupaten Cianjur, data BPS menunjukkan terdapat keselarasan antara tingginya perekonomian daerah dengan kepadatan penduduk. Kecamatan-kecamatan di WP Utara hampir seluruhnya memiliki jumlah kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan di WP Tengah dan WP Selatan serta memiliki kondisi perkonomian yang lebih baik pula.

Jumlah keluarga miskin dengan tingkat elstatisitas -0.3745 mempunyai dampak negatif cukup tinggi bagi pembangunan. Hal ini disebabkan pengentasan kemiskinan dan pembangunan mencerminkan kemajuan ekonomi dan sosial (Liu *et al.* 2017). Angka kemiskinan berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat untuk dapat hidup layak seperti daya beli, serta menunjukkan kegiatan perekonomian suatu wilayah. Menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2015 jumlah keseluruhan rumah tangga dan individu dengan kondisi kesejahteraan 21% sampai dengan 10% terendah di Kabupaten Cianjur (desil 3) masih cukup tinggi yakni berjumlah 90,946 rumah tangga dan 225,992 jiwa.

Arahan Rencana dan Strategi Pembangunan Wilayah

Arahan rencana pembangunan wilayah disusun dengan mempertimbangkan kondisi faktual serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan kondisi perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur saat ini masih didominasi oleh kecamatan-kecamatan dengan tingkat perkembangan rendah (hierarki III) serta memiliki nilai ketimpangan pembangunan yang terus meningkat. Selain itu, pembangunan di Kabupaten Cianjur secara signifikan dipengaruhi oleh faktor persentase rumah tangga pengguna listrik dan kepadatan penduduk dengan koefien positif, serta faktor jumlah keluarga miskin dengan koefisien negatif. Kebijakan percepatan pembangunan wilayah melalui sarana dan prasarana serta infrastruktur termasuk program pengurangan angka kemiskinan yang telah dirancang dalam RTRW 2011-2031 dan RPJMD 2016-2021 perlu segera dilaksanakan mengingat semakin meningkatnya ketimpangan pembangunan yang terjadi tidak hanya antar WP melainkan antar kecamatan dalam WP. Oleh karena itu, strategi dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur dapat dilakukan dengan:

1. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah seluruh kecamatan, terutama pada kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah pelayanan dan pusat kegiatan masyarakat namun masih memiliki tingkat perkembangan rendah yakni Sindangbarang, Sukanagara, Warungkondang, Pagelaran, Cidaun, Cikalongkulon, Bojongpicung, Takokak, Cibinong, Naringgul, dan Agrabinta.
2. Menjadikan ketimpangan pembangunan antarwilayah sebagai salah satu indikator dalam kebijakan pembangunan (RPJMD) bidang kesejahteraan dan pemerataan ekonomi selain indikator ketimpangan pendapatan antargolongan penduduk (indeks gini), agar target capaian pemerataan pembangunan wilayah dapat terukur.
3. Meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) di Kabupaten Cianjur karena sampai dengan tahun 2015 masih terdapat 107,584 rumah tangga yang belum menggunakan listrik. Rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik baru mencapai 82.74% atau 515,692 kepala keluarga.
4. Memperhatikan kondisi kependudukan dalam penentuan prioritas kebijakan pembangunan mengingat kepadatan penduduk memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan.
5. Menjalankan program pengentasan kemiskinan seperti program “insentif rakyat miskin” yang telah dicanangkan, serta merivitalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan arahan rencana dan strategi pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur. Pertama, tingkat perkembangan wilayah seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur pada umumnya mengalami peningkatan IPK, namun sebagian besar masih memiliki tingkat perkembangan wilayah rendah (hierarki III), sehingga kebijakan pembangunan harus memprioritaskan wilayah yang masih memiliki hierarki rendah terutama yang difungsikan sebagai wilayah pelayanan dan pusat kegiatan masyarakat. Kedua, pemerataan pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur cenderung mengalami penurunan akibat semakin meningkatnya nilai ketimpangan yang diukur dengan Indeks Theil. Agar target capaian pemerataan pembangunan wilayah dapat terukur perlu memasukan ketimpangan pembangunan antarwilayah sebagai salah satu indikator dalam fokus kebijakan RPJMD bidang kesejahteraan dan pemerataan ekonomi selain indikator ketimpangan pendapatan antargolongan penduduk (indeks gini). Ketiga, pembangunan di Kabupaten Cianjur secara signifikan dipengaruhi oleh faktor persentase rumah tangga pengguna listrik. Peranan penting listrik dalam proses produksi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengharuskan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah terutama peningkatan Rasio Elektrifikasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pusat Pembinaan dan Pendidikan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren Bappenas) yang telah mendukung pendanaan penelitian ini, serta para pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianoor P dan Muktiali M. 2015. Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Teknik PWK*. 4(4):484-498.
- Febrianty SD, Sela R.L.E, dan Tilaar S. 2015. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Wilayah Kota Tidore. *Jurnal Spasial*. 1(1):62-69.
- Firdaus M. 2011. *Aplikasi Ekonometrika untuk Data Panel dan Time Series*. Bogor (ID): IPB Press.
- Firdaus M. 2013. *Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif*. [Orasi Ilmiah]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Firmansyah LA, Soetarto E dan Kusnadi N. 2014. Regional Economic Development Strategy in Preparation for the Establishment of a New Autonomous Region in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 15(1): 100-108.
- Giannias DA, Belokrilova OS, Shevchenko IV, Chepurko Y and Iakovlev A. 2000. Index Based Regional Analysis: The Case of the Former Soviet Union and Russia. *Journal Economics of Planning*. 33:71-83.
- Herath S. 2017. Planning Sustainable Cities and Regions: Towards More Equitable Development. *Urban Policy and Research*. 35(1):93-96.
- Klasen S and Nestmann T. 2006. Population, Population Density and Technological Change. *Journal of Population Economics*, 19(3):611-626.
- Liu Y, Liu J, and Zhou Y. 2017. Spatio-Temporal Patterns of Rural Poverty in China and Targeted Poverty Alleviation Strategies. *Journal of Rural Studies*. 52:66-75.
- Lu S, Jiang H, Liu Y and Huang S. 2017. Regional Disparities and Influencing Factors of Average CO2 Emissions from Transportation Industry in Yangtze River Economic Belt. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*. 57:112-123.
- Meyer DF. 2016. The Formulation of a Composite Regional Development Index. *International Journal of Business and Management Studies*. 8(1):100-116.
- Panuju DR dan Rustiadi E. 2013. *Teknik Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Bogor (ID): DITSL-Faperta IPB.

- Prasetyo RB dan Firdaus M. 2009. Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. 2(2):222-236.
- Rahman A. 2009. *Analisis Disparitas Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten Sambas*. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Rustiadi E, Saefulhakim S dan Panuju DR. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bogor (ID): Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Sinha A and Rastogi SK. 2015. Inequality in Access to Improved Water Source: A Regional Analysis by Theil Index. *Journal of Theoretical Economics Letters*. 5(6):683-690.
- Wonua AN. 2014. The Analyzes of Scalogram, Performance-Importance and Hierarchy Process for Grand Strategy of The Agroindustry Development In Southeast Sulawesi. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*. 3(10):40-45.
- World Economic Forum. 2018. *The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data Highlight*. Jenewa (CH): World Economic Forum.
- Yu W, Qing T, Qin L and Li H. 2015. Fairness or Not? Health Resources Allocation in Chongqing-Based on Theil Index. *Journal of Social Sciences*. 3(7):117-123.